

BAB VI

PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA TAHUN 2012

A. KONDISI UMUM

Di dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2012, pembangunan transportasi udara ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan, yaitu strategi pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan udara, serta strategi pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas dan pelayanan transportasi udara, yang dilaksanakan melalui peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan dalam penyelenggaraan transportasi udara; meningkatkan kualitas dan produktifitas pelayanan dengan penerapan manajemen mutu untuk memenuhi kebutuhan (*demand*) jasa transportasi udara, menciptakan iklim usaha jasa transportasi dalam persaingan yang sehat dan kondusif menuju industri penerbangan yang efisien, efektif, kompetitif dan berkelanjutan, yang mendorong minat investasi pihak swasta; dan memperluas jangkauan pelayanan hingga ke daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, serta mampu mendukung penanganan bencana.

Prioritas pembangunan bandar udara di Indonesia didasarkan pada :

1. Pemeliharaan/perawatan dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Pembangunan/pengembangan bandar udara bagi pengoperasian pesawat sejenis B 737 untuk ibukota provinsi dan pembangunan Bandar Udara yang ramah terhadap lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim global (*climate change*);
3. Perhatian khusus kepada pengembangan bandar udara pada daerah terisolasi, daerah perbatasan terutama kawasan/daerah tertinggal dan daerah rawan bencana;
4. Pemenuhan permintaan jasa transportasi udara saat ini dan yang akan datang, didasarkan pada analisis permintaan versus kapasitas.

Prioritas pembangunan transportasi udara pada tahun 2012 yaitu:

1. Pemenuhan Pendanaan Kontrak *Multi Years* (Bandara Kualanamu Medan, dan Pengadaan Pesawat Kalibrasi);
2. Program kegiatan yang bersifat Lanjutan dan/ atau penyelesaian pembangunan sehingga dapat segera beroperasi;
3. Pembentukan 10 Kantor Otorita Bandara;
4. Pengembangan Bandara di Koridor Ekonomi yang mendukung Masterplan Percepatan Pengembangan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
5. Pengoperasian 14 Bandara Baru (Sesuai Direktif Presiden dalam Nota Keuangan tahun 2010):
 - a) Bandara Muara Bungo
 - b) Bandara Muara Teweh Baru- Kalimantan Tengah
 - c) Bandara Morowali – Sulteng

- d) Bandara Tojo Una-Una – Sulteng
 - e) Bandara Bone – Sulsel
 - f) Bandara Saumlaki Baru
 - g) Bandara Tual Baru- Ibra
 - h) Bandara Kufar
 - i) Bandara Namniwel
 - j) Bandara Waisai
 - k) Bandara Enggano
 - l) Bandara Sumarorong
 - m) Bandara Sinak Baru
 - n) Bandara waghete baru.
6. Pembangunan Bandara di Kawasan Perbatasan dan Rawan Bencana.
 7. Rehabilitasi dan Pengembangan Prasarana Bandar Udara.
 8. Penyediaan Subsidi Angkutan Udara Perintis dan Angkutan BBM Penerbangan Perintis yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia;
 9. Pengadaan dan pemasangan Fasilitas Keamanan, Keselamatan dan Navigasi Penerbangan;
 10. Pengadaan dan pemasangan *Jakarta Automatic Air Traffic System* (JAATS);

Upaya dan hasil-hasil yang dicapai untuk Pembangunan Prasarana Bandar Udara berdasarkan KM 11 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Kebandarudaraan Nasional adalah 233 bandar udara yang terdiri dari 164 bandara yang dikelola UPT Ditjen Hubud, 13 bandara yang dikelola PT (Persero) Angkasa Pura I, 12 bandara yang dikelola PT (Persero) Angkasa Pura II dan 14 bandara baru.

Hingga tahun 2008 terdapat beberapa pembangunan bandar udara yang telah dan akan dilanjutkan secara bertahap untuk melayani penerbangan umum yang merupakan bandara-bandara baru yaitu Bandara Dobo, Saumlaki Baru, Seram Bagian Timur, Namniwel, Sam Ratulangi, Dumatubun Baru, Waghete Baru. Pembangunan dan pengembangan bandar udara di daerah rawan bencana dan perbatasan untuk mengantisipasi bencana serta melaksanakan pengamanan wilayah Indonesia (secara *security approach* maupun *prosperity approach*) dibuat program pembangunan dan pengembangan bandar udara untuk didarati pesawat sekelas F-27/C-130 Hercules pada lokasi yang sudah atau belum ada bandara dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap dengan prioritas berdasarkan kebutuhan di lapangan dan ketersediaan pendanaan.

Pembangunan fasilitas landasan yang tersebar di seluruh bandara di Indonesia pada tahun 2008 seluas 982.170m², dengan pembangunan fasilitas bangunan pada tahun 2008 seluas 56.957 m² dan pembangunan fasilitas terminal 1.161 m². Tahun 2009 pembangunan fasilitas sisi udara meningkat sebesar 1.298.433 m², pembangunan fasilitas terminal seluas 5.246 dan pembangunan fasilitas gedung dan bangunan seluas 108.956 m². Tahun 2009 pembangunan fasilitas sisi udara sebesar 1.298.433 m², pembangunan fasilitas terminal seluas 5.246 m² dan pembangunan fasilitas gedung dan bangunan seluas 108.956 m². Pada tahun 2010 pembangunan fasilitas sisi udara seluas 290.214 m² (meliputi pembangunan runway,

apron, taxiway), dengan pembangunan fasilitas bangunan seluas 20.093.977 m² dan pembangunan fasilitas terminal pada tahun 2010 seluas 12.371 m².

Untuk menunjang aktivitas penerbangan malam dan meningkatkan minimal operasional (*visibility*), maka bandara telah dilengkapi dengan lampu landasan (*Runway Light*), yang diantaranya dilengkapi dengan lampu pendaratan PALS (*Precision Approach Lighting System*) dan dilengkapi dengan MALS (*Medium Approach Lighting System*). Pemasangan ILS (*Instrumen Landing System*) yang digunakan sebagai alat bantu pendaratan instrument (non visual) oleh penerbang dalam melakukan prosedur pendekatan dan pendaratan hingga pada tahun 2010 telah terpasang ILS sebanyak 43 unit di 43 lokasi bandara.

Dalam rangka pemantauan dan pengamatan penerbangan, secara bertahap dialokasikan pemasangan RADAR. Hingga tahun 2010 telah terpasang peralatan RADAR sebanyak 38 Unit di 21 lokasi yang terdiri dari PSR (*Primary Surveillance Radar*) sebanyak 15 Unit, SSR (*Secondary Surveillance Radar*) sebanyak 12 Unit, dan MSSR (*Monopulse Secondary Surveillance Radar*) sebanyak 11 unit.

Jumlah peralatan NDB sebagai peralatan navigasi sampai dengan tahun 2010 telah terpasang sebanyak 177 unit yang hingga sekarang tidak ditambah lagi terkait dengan perkembangan teknologi navigasi. Penggunaan NDB saat ini hanya dibatasi sebagai *locator system* untuk pendaratan presisi (*ILS*) saja, sedangkan untuk menunjang *approach* dan *enroute*, menggunakan DVOR dan DME sehingga jumlahnya tidak ditambah.

Pemasangan DVOR/DME hingga tahun 2010 jumlah peralatan DVOR yang terpasang meningkat menjadi 67 unit dan DME sebanyak 77 unit. Dengan dipasangnya alat tersebut, maka proses pendekatan dan pendaratan pesawat udara yang sebelumnya dilakukan dengan prosedur visual (*visual approach*) akan meningkat menjadi prosedur instrumen non presisi, sehingga dapat meningkatkan aspek keselamatan penerbangan. Hingga saat ini kebutuhan DVOR/DME untuk *enroute* sudah mencukupi, sedangkan untuk kebutuhan *approach*, perlu dikaji secara selektif.

Untuk peralatan komunikasi penerbangan sampai dengan tahun 2010 telah terpasang 351 unit HF-SSB (*High Frequency Single Side Band*), sebagai fasilitas komunikasi *point to point* (*Ground to Ground*) antar bandara. Sedangkan untuk peralatan komunikasi *Air to Ground* pada tahun 2010 dilakukan pemasangan VHF-portable sebanyak menjadi 259 unit dan VHF-ER sebanyak 121 set. Dengan penambahan peralatan tersebut sebagian bandara telah mengalami peningkatan pelayanan lalu lintas penerbangan yang semula bersifat informatif menjadi aktif (*positif controlled*), Hingga tahun 2010 jumlah peralatan pelayanan lalu lintas udara ADC sebanyak 69 unit, sedangkan untuk pelayanan APP (*Approach Controle*) sebanyak 33 unit, dan ACC (*Area Controle*) sebanyak 0 bandara.

Sebagai penunjang operasional dan keamanan maka tiap-tiap bandara dilengkapi dengan peralatan *security*. Peralatan *Security X-Ray* dan kelengkapannya di bandara terdiri atas peralatan *X-Ray Bagage*, *X-Ray Cargo* dan *X-Ray Cabin*. Pada tahun 2008 peralatan *Security X-Ray* telah

terpasang sebanyak 25 unit, tahun 2009 peralatan *security X-Ray* telah terpasang sebanyak 34 unit dan hingga tahun 2010 bertambah menjadi 45 unit. Penambahan termasuk penggantian peralatan tersebut dapat bermanfaat meningkatkan kecepatan dalam pemeriksaan/pendeteksian barang bawaan yang berbahaya terhadap penerbangan dan calon penumpang pesawat.

Guna peningkatan pelayanan dan kualitas informasi yang diperlukan bagi calon penumpang pesawat udara dilakukan pemasangan peralatan FIDS beserta kelengkapannya. Pemasangan peralatan *Flight Information Display System* (FIDS) dan *Public Address System* (PAS) pada tahun 2009 jumlah FIDS bertambah menjadi 33 unit dan PAS sebanyak 39 unit, pada tahun 2010 penambahan peralatan *Integrated Ground Communication System* (IGCS) sebanyak 1 unit sehingga jumlahnya menjadi 4 unit di 3 bandara. Dengan dipasangnya peralatan IGCS telah mengurangi penggunaan jumlah jalur frekuensi dan meningkatnya kualitas komunikasi antar unit kerja terkait di bandara.

Sebagai penunjang kegiatan operasional terutama bagi bandara – bandara yang memiliki kebutuhan daya listrik yang besar pemasangan genset menjadi suatu kebutuhan untuk menunjang operasional peralatan-peralatan penunjang keselamatan penerbangan. Pemasangan peralatan genset disesuaikan dengan kebutuhan daya dan kapasitas bandara.

Dalam mengantisipasi perkembangan arus lalu lintas udara dan teknologi CNS/ATM serta mengatasi keterbatasan yang ada saat ini dan menampung pertumbuhan transportasi udara dimasa datang, pada tahun 2008 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: Implementasi penggunaan GNSS sebagai alat bantu navigasi penerbangan; Restrukturisasi ATS rute; Implementasi RNP (*Required Navigation Performance*)/RNAV(*Radio Area Navigation*) pada ATS routes tertentu; Implementasi RVSM (*Reduced Vertical Separation Minima*) (mulai FL290 hingga FL410); Persiapan penerapan otomasi peralatan ATS di Makassar (MAATS) untuk CPDLC dan ADS-C serta ADS-B; Penerapan prosedur-prosedur operasional berbasis satelit (GNSS) dan CPDLC. Implementasi *New English Proficiency*; Persiapan modernisasi sistem otomasi di ATC Jakarta (*Jakarta Automation Air Traffic System*) untuk sistem otomasi di wilayah Barat, direncanakan untuk dilakukan modernisasi mulai tahun 2009; Instalasi sistem peralatan ADS-C dan ADS-B dilokasi yang belum terjangkau RADAR serta sebagai pengganti dan back up untuk sistem RADAR yang usia rata-ratnya sudah tua. Terkait dengan pengelolaan navigasi udara, hingga saat ini akan dilakukan kajian oleh team untuk memformulasikan bentuk kelembagaan dan pengelolaan ANSP (*Air Navigation Single Provider*) yang tertuang didalam UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Adapun kegiatan tahun 2010 dalam mengantisipasi perkembangan arus lalu lintas udara antara lain pembangunan gedung JAATS untuk mendukung semua kegiatan navigasi saat ini.

Hingga tahun 2010 jumlah pesawat yang teregistrasi sebanyak 1.118 unit dengan rincian : pesawat beroperasi 853 unit, terdiri dari *Fix Wings* 727 unit dan *Rotary wings* 126 unit. Pesawat terdaftar AOC 135 (seat < 30) sebanyak 225 unit, AOC 121 (seat > 30) sebanyak 440 unit dan AOC 91 (*general*

aviation) sebanyak 188 unit, untuk tahun 2009 jumlah pesawat yang teregistrasi sebanyak 1009 unit dengan rincian : pesawat beroperasi 766 unit, terdiri dari *Fix Wings* 649 unit dan *Rotary wings* 117 unit. Pesawat terdaftar AOC 135 (seat < 30) sebanyak 192 unit, AOC 121 (seat > 30) sebanyak 381 unit. AOC 91 (*general aviation*) sebanyak 193 unit. dan pada tahun 2008 terdapat 962 pesawat yang terdaftar, 702 pesawat udara yang beroperasi, pesawat dengan AOC 135 sebanyak 209 unit, AOC 121 sebanyak 351 unit, AOC 91 sebanyak 142 unit, dengan 58 pesawat udara yang telah dihapus tanda pendaftarannya.

Saat ini sampai dengan Bulan Mei 2011 jumlah perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang beroperasi adalah sebanyak 18 perusahaan termasuk cargo, untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang beroperasi sebanyak 40 perusahaan. Pada tahun 2009 jumlah perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang beroperasi adalah sebanyak 16 perusahaan. Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal khusus kargo 1 perusahaan, perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal 34 perusahaan, dan perusahaan angkutan udara bukan niaga 25 perusahaan. Pada tahun 2008 jumlah perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang beroperasi sebanyak 15 perusahaan. Perusahaan niaga berjadwal khusus kargo sebanyak 4 perusahaan, dan perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal sebanyak 23 perusahaan.

Adapun perkembangan jumlah penumpang antara lain terbagi atas penumpang domestik, penumpang internasional dan kargo.

- Jumlah penumpang domestik pada tahun 2008 jumlah penumpang domestik menurun sekitar 4,48% dari Tahun 2007 menjadi 37,41 juta penumpang. Pada tahun 2009 jumlah penumpang domestik meningkat menjadi 43, 81 juta penumpang dan pada tahun 2010 menjadi 51,78 juta penumpang.
- Jumlah penumpang luar negeri pada tahun 2008 mengalami peningkatan 28,64% dari tahun 2007 menjadi 4.10 juta penumpang. Pada tahun 2009 jumlah penumpang luar negeri menjadi 5,04 juta penumpang dan kembali meningkat pada tahun 2010 menjadi 6,61 juta penumpang.
- Angkutan kargo dalam negeri mengalami kenaikan pada tahun 2007 sebesar 288,39 juta ton dari tahun 2006, dan untuk tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 338,23 juta ton sedangkan untuk tahun 2009 menjadi 391,67 juta ton dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 749,20 juta ton. Sedangkan angkutan kargo luar negeri pada tahun 2006 sebesar 77.86 juta ton meningkat menjadi 42,32 juta ton pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan 0, 32% menjadi 42,46 juta ton. Pada tahun 2009 jumlah angkutan kargo luar negeri menjadi 46,49 juta ton dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 79,55 juta ton.

Perkembangan Subsidi Operasi Angkutan Udara Perintis selama kurun waktu tahun 2008-2010 mengalami peningkatan. Penerbangan Perintis pada tahun 2008 terdapat 6 rute perintis baru : Banda Aceh – Tapak Tuan PP, Medan – Blang Pidie PP, Palu-Poso PP, Manado-Naha PP, Kendari –

Bau-Bau PP, Langgur – Larat PP. Namun untuk rute Kendari – Bau-Bau PP subsidi dihapus karena tidak ada operator, begitu juga untuk rute Palangkaraya – Kuala Kurun PP, Palangkaraya – Kuala Pembuang PP dan Palangkaraya – Buntok PP dikarenakan tidak ada operator yang melayani. Pada tahun 2010 jumlah rute perintis sebanyak 118 rute meningkat dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 94 rute.

Terkait dengan peraturan dan regulasi penerbangan nasional, sebagai tindak lanjut penerbitan UU No.1 Tahun 2009 saat ini akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Pada tahun 2008 terdapat beberapa peraturan Dirjen Perhubungan Udara mengenai persetujuan pengujian peralatan *Ground Support Equipment (GSE)* yang dilakukan melalui SKEP/89/IV/2008 dan SKEP/91/IV/2008. Peraturan Dirjen Hubud No. 95 tahun 2008 tentang Petunjuk teknis penanganan Petugas Pengamanan dalam Penerbangan (*In-Flight Security Officer/Air Marshal*) pesawat udara niaga asing. Peraturan Dirjen Hubud No.195/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*), juga peraturan mengenai Sertifikasi Kecakapan Petugas dan Teknisi Perawatan Kendaraan PKP-PK serta petugas *Salvage* melalui SKEP Dirjen No.199/IX/2008.

Terkait dengan aspek Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, didalam mencapai suatu tingkat keselamatan penerbangan yang diinginkan diperlukan metode dan tindakan-tindakan tertentu salah satunya adalah *Safety Management System (SMS)*, yaitu suatu pendekatan terorganisir untuk mengelola keselamatan, yang mencakup struktur organisasi yang diperlukan, tanggung jawab, kebijakan dan prosedur. Sampai dengan tahun 2008 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari SMS, yaitu kegiatan sertifikasi operasi bandar udara, sertifikasi peralatan keamanan, dan sertifikasi pesawat udara.

Pada tahun 2010 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pengembangan *Aerodrome Safety Management System (SMS) Manual* yang berlangsung mulai tanggal 8 -12 Maret 2010 di Bandar Udara Ngurah Rai, Bali dan pada tahun 2011 disusun kegiatan *System Safety Audit* yang dilakukan kepada operator penerbangan setiap bulannya. Kegiatan – kegiatan tersebut merupakan bagian dari program *Safety Management System* dengan cara mengidentifikasi beberapa gejala yang menyebabkan kecelakaan; menindak lanjuti perbaikan yang harus dilaksanakan untuk meyakinkan standar tingkat keselamatan selalu terjaga; memonitor secara berkesinambungan dengan melakukan pengawasan secara berkala terhadap tingkat keselamatan penerbangan; kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Sertifikasi Operasi Bandar Udara Pada 57 bandara, Sertifikasi peralatan keamanan pada 2 bandara, Sertifikasi pesawat udara pada 536 pesawat udara, Sertifikasi Fasilitas Peralatan RDPS Medan, Sertifikasi Fasilitas MAATS, Pembuatan Peraturan (PP, KM) terkait dengan pelaksanaan *Safety Management System (SMS)*, Pembuatan organisasi formal yang terkait dengan pelaksanaan SMS.

Pelarangan terbang maskapai Penerbangan Nasional pada wilayah Eropa sampai dengan tahun 2009 telah dicabut pada bulan Juli 2009 seiring dengan kebijakan - kebijakan dari Ditjen Perhubungan Udara dalam menindaklanjuti hasil audit ICAO, diantaranya melakukan restrukturisasi organisasi kantor pusat Ditjen Perhubungan Udara dengan dikeluarkannya KM 20 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dengan struktur baru yaitu (1) Direktorat Angkutan Udara (2) Direktorat Bandar Udara (3) Direktorat Keamanan Penerbangan (4) Direktorat Navigasi Penerbangan (5) Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. Peningkatan *safety oversight*, Peningkatan inspektur Ditjen Hubud, Pengaktifan PPNS, Penindaklanjutan hasil ICAO USOAP audit, peningkatan anggaran operasional, melaksanakan training SMS, mengeluarkan *safety circular*, dan merevisi beberapa peraturan penerbangan yang ada mengacu kepada ketentuan dari ICAO.

Kualitas Pelayanan Navigasi Penerbangan pada *Flight Information Region* Indonesia melalui *Breakdown of Separation (BOS)* adalah situasi dimana pesawat udara berada pada posisi diluar area separasi baik lateral maupun vertikal yang sudah ditetapkan. *Breakdown of Coordination (BOC)* adalah situasi dimana terjadi penurunan pelayanan akibat menurunnya kualitas koordinasi antar unit pelayanan, atau unit pelayanan dengan pesawat udara. Data BOS dan BOC terdiri dari lokasi dan tanggal kejadian, ATS unit dan pesawat terbang terkait serta informasi faktual dilapangan. Sesuai dengan data yang telah dilaporkan sejak 2001 hingga 2008, kecenderungan BOC adalah naik seiring dengan kenaikan jumlah pergerakan pesawat (data *aircraft departure*) namun dengan gradien yang rendah, sedangkan untuk BOS cenderung tetap. Untuk mengurangi kejadian BOS dan BOC dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan navigasi penerbangan, Ditjen Hubud telah menyiapkan berbagai hal, yaitu: pembuatan *Letter of Operation Agreement* antar Bandara yang saling terkait serta antar ACC negara tetangga. Dengan *Letter of Operation Agreement* yang telah terbentuk adalah: (1) LOA antara Bandara Sultan Syarif Kasim II- Pekanbaru dengan bandara AFIS yang terletak di Propinsi Riau (Dumai info, Pelelawan info, Pasi Info, Rumbai) (2) LOA antara ACC Makassar, APP Juwata Tarakan dan TWR Bandara Kalimantan. (3) Pemenuhan kemampuan *Controller /pemandu lalu lintas udara* untuk berbahasa Inggris penerbangan. Pelaksanaan Diklat Diploma IV (RADAR) *Refreshing Course* serta Diklat *ATC Check Controller* bagi ATC, Penerbitan Approval *ATS Training School*.

Di bidang navigasi penerbangan, Tahun 2008 telah ditetapkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil yang mengatur tentang sertifikasi fasilitas navigasi (CASR part 171), pelayanan navigasi (CASR part 172), prosedur penerbangan (CASR part 173) dan informasi aeronautika (CASR part 175). Dibidang pelayanan bandar udara juga sudah disiapkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil tentang bandar udara (CASR part 139). Pada Tahun 2011 dibuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 (CASR 172) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan.

Pada tahun 2006 Ditjen Perhubungan Udara telah menerapkan *National Single Window (NSW)* sebagai tindak lanjut Inpres No. 3 Tahun 2006

tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Upaya yang telah dilakukan adalah perbaikan prosedur penyampaian *notice of arrival*, evaluasi penetapan tarif berupa pengenaan tarif perhari dan penataan gudang serta Pembangunan terminal kargo, penataan prosedur dan *lay out* terminal serta sosialisasi proses pelayanan kargo selama 24 jam. Dalam rangka mempercepat pembentukan ASEAN Economic Community sebagaimana tertuang dalam Declaration Of Asean Concord II (Bali Concord II), negara-negara anggota ASEAN melalui *Agreement to Establish and implement The Asean Single Window (ASW)*. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan sistem *National Single Window* Bandar Udara Soekarno Hatta telah melakukan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dalam rangka *Implementasi Single Window* di Bandar Udara dan spesifikasi sarana pendukung *prototype* aplikasi NSW. Peluncuran kegiatan dimaksud dilakukan pertengahan Desember 2008 melibatkan beberapa airline, dan kargo handling sebagai peserta uji coba. Dan untuk mendukung dilakukan sosialisasi kepada penyelenggara Bandar Udara, Airline, komunitas kargo, *ground handling, warehouse operator*.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan telah di keluarkan keputusan tentang Pembatasan Umur Pesawat melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 tahun 2006 tentang pembatasan pesawat udara kategori transport untuk penumpang, dimana pesawat udara yang boleh didaftarkan untuk pertama kali di Indonesia adalah yang berusia kurang dari 20 tahun atau kurang dari 50000 *cycle*. Dan sebagai upaya pengawasan dan peningkatan keselamatan penerbangan dan pemenuhan regulasi serta kelancaran angkutan udara telah dilakukan *ramp-check* yang berkala dan pada periode 31 Desember 2008 pada 14 (empat belas) lokasi dan 2 (dua) lokasi Adbandara (Soekarno Hatta dan Bali) dengan hasil pesawat yang dilakukan inspeksi 331 unit dari 22 operator. Dalam kegiatan *ramp-check* dilakukan rutin pada waktu khusus seperti Lebaran, Natal, dan Tahun baru.

Dalam Kerjasama Luar Negeri Angkutan Udara Internasional untuk menghadapi perkembangan dan perubahan di dunia penerbangan, Indonesia telah menyiapkan kebijakan-kebijakan angkutan udara guna meningkatkan daya saing dunia penerbangan di Indonesia. Liberalisasi angkutan udara di Indonesia dilakukan secara bertahap mengingat kendala-kendala sebagai berikut : Kinerja perusahaan nasional belum optimal untuk mengembangkan cakupan usaha dan meningkatkan daya saingnya; Potensi demand sebagian besar kota-kota di Indonesia yang mempunyai bandar udara internasional masih rendah, sehingga penerapan *open sky* secara langsung hanya terfokus pada kota-kota yang *market demand*-nya tinggi, seperti Jakarta, Denpasar, Surabaya, Medan dan Padang; Pandangan masyarakat dunia terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia dan perangkat hukum yang belum terintegrasi dengan baik (bersifat sektoral).

Dengan liberalisasi yang dilakukan secara bertahap, Indonesia diharapkan memperoleh manfaat dari : Pertumbuhan perdagangan dan pariwisata; Pengembangan industri penerbangan; Pertumbuhan ekonomi daerah karena ada hubungan udara langsung dengan negara lain termasuk sektor

pariwisata; Menciptakan dan Memperkuat hubungan serta kerjasama antar *airlines* internasional bagi perusahaan penerbangan; Meningkatkan daya saing *airlines* nasional terhadap *airlines* asing; Kerjasama antara *airlines* nasional dan asing serta menghindari terjadinya “*back-track traffic*”.

Dalam tahun 2008 terdapat beberapa yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara terutama dalam peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia, diantaranya: pertemuan *Conference Roadmap to Safety* dalam rangka percepatan pencabutan larangan terbang oleh EU dan pertemuan ini diselenggarakan oleh *European Commission* yang diikuti oleh seluruh tenaga Inspektor Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. Kegiatan pelatihan *Risk Assesment* selama 3 hari yang dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pacific-Jakarta pada tanggal 23 s/d 25 Juni 2008. Penyerahan *Corrective Action Plan* dari hasil temuan ICAO USOAP pada bulan Mei 2008 selama 12 hari di Ngurah-Rai Denpasar. Pertemuan 2nd *Steering Committee Meeting Cooperative Arrangement for Preventing the Spread of Communicable Diseases Through Air Travel (CAPSCA)* yang dihadiri oleh 80 peserta yang terdiri dari 30 delegasi dari 11 negara anggota/administrasi ICAO. Pertemuan sidang thee 3rd *D-8 Working Group on Civil Aviation and Director General Meeting* tanggal 17 s.d 18 Juni 2008 di Bali. Pelaksanaan *training Carrier Liaison Training (Identification of Travel Document)* kerjasama Ditjen Hubud dengan *Embassy of the United States*. Penyelenggaraan Seminar *A Single National Air Navigation Service Provider (ANSP)* yang dihadiri Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan, Presiden ICAO Roberto Kobeh Gonzales dan beberapa Pembicara dari Perwakilan ASA Australia, JICA, IATA, CANSO, dan INACA. Maksud dari kegiatan ini adalah dalam memberikan masukan bagi peningkatan keselamatan penerbangan di Indonesia.

Terdapat beberapa tingkatan yang dilakukan dalam liberalisasi angkutan udara, yaitu Forum WTO adalah forum mondial (dunia/ global) yang beranggotakan semua negara di dunia dan hingga saat ini masalah liberalisasi angkutan udara yang dibahas hanya mengenai “*jasa penunjang (soft rights)*”, yang tertuang dalam *GATS Annex on Air Transport, yaitu Aircraft repairs and maintenance, Selling and marketing of air transport dan Computer reservation system (CRS)*. Permasalahan di dalam forum WTO yang terkait masalah *Air transport* adalah masih adanya perbedaan masalah kewenangan antara WTO dengan ICAO dalam meliberalisasikan bidang *hard rights*.

Posisi Indonesia hingga tahun 2008 belum membuat komitmen, karena prioritas liberalisasi angkutan udara masih di tingkat regional (ASEAN), sedangkan liberalisasi angkutan udara di tingkat APEC membahas bidang-bidang angkutan udara yang tertuang dalam 8 opsi yang terkait dengan *Airlines Ownership and Control*, Secara umum Indonesia menggunakan prinsip substansial *ownership and Effective Control* dan *Multiple Airlines Designations (no restriction)*.

Indonesia telah menerapkan dalam setiap perjanjian antara lain tarif (*double disapproval*). Indonesia telah mengarah pada *double disapproval* dengan beberapa ketentuan pengaman. Dalam *Air Freight (more relaxation arrangement than passengers)*, Indonesia telah merelaksasi pengaturan hak

angkutan untuk *air freight, Airline's Cooperative Arrangement (eq. Third Country Code Sharing)*, dimana Indonesia membuka kerjasama komersial dalam bentuk *third party code sharing* dengan persyaratan *5th freedom rights* bagi *airlines* pihak ketiga, *Charter Services (Competitor scheduled Airlines)*. Secara umum *charter* merupakan *supplement* bagi *schedule services*, yakni *Market Access (Open all international Airport)*. Semua bandara internasional Indonesia terbuka untuk asing, *Doing Business (free transfer of earning, free to open representative, free to sell and advertise airlines product, etc)* dan Indonesia cukup terbuka dalam hal *doing business matters*.

Liberalisasi di tingkat ASEAN membahas 2 (dua) bidang, yaitu Bidang *Soft Right* (jasa penunjang penerbangan) yang diatur dalam *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* yang meliputi *Computer Reservation System (CRS), Aircraft main-tenance and Repairs, Sales and Marketing, Aircraft Leasing Without Crew*. Posisi Indonesia telah membuka keempat bidang tersebut sampai dengan mode 3, yaitu dengan kepemilikan asing maksimal 49% (kecuali *Aircraft Leasing Without Crew* yang hanya dibuka untuk mode 1 dan 2) dan dalam Bidang *Hard Right* (jasa penerbangan) yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : angkutan kargo dan angkutan penumpang. Untuk *Hard Right* liberalisasi dilakukan dengan mengacu pada *ASEAN Roadmap Integration on Air Travel Services*. Mengingat *Roadmap* adalah kesepakatan ASEAN yang bersifat mengikat para anggotanya, Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN harus tunduk pada *Roadmap* dimaksud.

Sidang ATWG ke 17, 8-10 April 2008 menghasilkan final *Text Draft ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Air/Air Freight Services* yang siap ditandatangani oleh para Menteri Transportasi ASEAN pada waktu yang ditentukan kemudian. Indonesia menyatakan belum siap untuk meliberalisasi beberapa bidang jasa dan akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu.

BIMP-EAGA Working Group on Air Linkages pada daerah-daerah yang dikembangkan adalah Bandar Seri Begawan - Brunei, Pontianak, Tarakan, Manado, Balikpapan - Indonesia, Miri, Labuhan, Kota Kinabalu, Kuching - Malaysia dan Davao, General Santos, Zamboanga, P. Princessa, Mindanao - Philippina. Konsep *3rd & 4th* yaitu kapasitas, frekuensi dan tipe pesawat tidak dibatasi, *5th freedom* yaitu dilakukan dengan ketentuan penambahan per tahun 2 (dua) point sejak tahun 2006 *Multi designnated airlines*.

Kegiatan *5th Transport, Infrastruktur & ICT Cluster Meeting BIMP-EAGA, Brunei* 2-4 April 2008. Hasilnya adalah Batavia Air telah mengubah usulan untuk melakukan penerbangan dengan hak angkut kelima pada rute Pontianak-Kuching-Bandar Seri-Begawan menjadi penerbangan dengan hak angkut ketiga dan keempat pada rute Pontianak-Kuching dan Pontianak-Bandar Seri Begawan. Indonesia membuka point tambahan dengan mengajukan 4 (empat] point yakni: Balikpapan, Pontianak, Manado, dan Tarakan. Indonesia (PT. Angkasa Pura I) melaporkan kebijakan pemberian insentif kepada perusahaan angkutan udara Negara anggota BIMP-EAGA yang beroperasi di *designated point* Indonesia, dengan pemberian potongan harga *landing fee* hingga 50% (tergantung *load factor*) bagi rute baru di Balikpapan dan Manado, serta *free parking fee* untuk

airlines yang parkir di apron kurang dari 2 jam. Penetapan Balikpapan sebagai tambahan *hub gateway* BIMP-EAGA, selain kota Kinabalu dan Bandar Seri Begawan.

IMT-GT, merupakan kerjasama sub-regional diantara 3 negara, yaitu: Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang bertujuan untuk mengem-bangkan wilayah perbatasan antara 3 negara. Daerah-daerah yang dikembangkan di Indonesia adalah : Medan, Banda Aceh, Nias, Padang; Di Malaysia : Ipoh, Langkawi, dan Penang, sdangkan di Thailand: Hat Yai, Pattani, Narathiwat, Phatthalung, Trang dan Nakhon Si Thammarat. Pada tahun 2008 dlaksanakan IMT GT *Strategic Planning Meeting* 2008, Phuket Thailand pada tanggal 28-30 Januari 2008. Sidang membahas *Joint Statement* dari hasil Pertemuan Summit IMT-GT ke 3 yang telah diselenggarakan pada bulan Nopember 2007, diantaranya yaitu: perluasan wilayah IMT-GT termasuk 6 propinsi di Thailand sebagai wilayah baru yaitu: Phuket, Phang Nga, Krabi, Ranong, Chumphon dan Surat Thani, penetapan secara resmi *Visit* IMT-GT 2008.

Pada tahun 2005 Indonesia telah melakukan perjanjian hubungan udara dengan 68 negara. Pada tahun 2006 Indonesia telah melakukan 9 kali perjanjian hubungan udara bilateral. Perjanjian bilateral tersebut terdiri dari 3 perjanjian dengan negara baru (Islandia, Yunani dan Kenya) dan 6 perjanjian untuk merevisi MOU (UAE 2 kali perte-muan, Kamboja 2 kali pertemuan, Saudi Arabia dan Oman). Dengan tambahan 3 negara baru, sampai saat ini Indonesia telah memiliki perjanjian hubungan udara dengan 71 negara yang terdiri dari 2 negara di belahan Amerika Utara, 26 negara Eropa, 13 negara ASIA, 10 negara ASEAN, 5 negara Afrika, 11 negara Timur Tengah/Arab dan 4 negara Pasific. Dari 71 negara yang telah membuat perjanjian hubungan udara dengan Indonesia, 22 negara telah merealisasikan perjanjian tersebut. Sampai dengan tahun 2008 Indonesia telah memiliki perjanjian hubungan udara bilateral dengan 71 negara. Negara-negara mitra Indonesia berdasarkan wilayah adalah:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| (1) Amerika Utara | : 2 Negara |
| (2) Eropa | : 26 Negara |
| (3) Asia | : 14 Negara |
| (4) Asean | : 10 Negara |
| (5) Afrika | : 6 Negara |
| (6) Timur Tengah/Arab | : 10 Negara |
| (7) Pacific | : 3 Negara |

Jumlah perjanjian hubungan udara bilateral 71 negara, 36 operator penerbangan dari 22 negara melaksanakan penerbangan ke 11 kota tujuan di Indonesia (Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Denpasar, Mataram, Manado), 9 perusa-haan penerbangan nasional terbang ke 12 negara (Hongkong, RR.China, Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, Philipina, Australia, Selandia Baru dan Arab Saudi) dengan 25 kota tujuan di mancanegara. Salah satu kerjasama yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah Pada tanggal 18-20 Oktober 2010 diadakan SKB IV Federasi Rusia di Jakarta. Poin-poin pembicaraan pada SKB tersebut antara lain: Transaero sebagai *designated airlines* dari Rusia telah menerbangi penerbangan

berjadwal ke/dari Indonesia atas dasar ijin sementara. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perundingan pada bulan April 2010.

Pelaksanaan angkutan Haji pada fase pertama (keberangkatan) yang dimulai tanggal 4 Nopember 2008 s.d 10 Januari 2008 dilaksanakan melalui 11 embarkasi yaitu dengan pesawat Garuda Airline pada Embarkasi Banda Aceh, Padang, Palembang, Jakarta, Solo, Banjar-masin, Makassar, serta dari embarkasi Surabaya. Dan dengan pesawat Saudi Arabian Airlines melayani embarkasi Medan, Batam, Jakarta dan sebagian jemaah haji Surabaya.

Selama periode 5 Nopember 2008 s.d 2 Desember 2008 (phase I pemberangkatan) telah diberangkatkan sebanyak 192.179 jemaah haji yang tergabung dalam 493 Kloter. Selama periode 14 Desember 2008 s.d 10 Januari 2009 (phase II pemulangan), telah dipulangkan sebanyak 191.773 jemaah haji yang tergabung dalam 492 kloter. Pada tahun 2009 keberangkatan jemaah haji menjadi 191.414 jemaah haji dan meningkat jumlahnya pada tahun 2010 198.668 jemaah haji dari 11 (sebelas) Bandar Udara Embarkasi.

B. SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran Pembangunan Transportasi Udara Tahun 2012 adalah:

1. Terjaminnya keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum serta kualitas pelayanan, kenyamanan, dalam penyelenggaraan transportasi udara;
2. Terwujudnya pertumbuhan Sub Sektor Transportasi Udara yang stabil dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (*sustainable growth*);
3. Terwujudnya persaingan usaha yang kompetitif didalam industri penerbangan nasional, yang menjamin kelangsungan usaha;
4. Terwujudnya aksesibilitas pelayanan angkutan udara yang terjangkau ke seluruh pelosok tanah air, sehingga dapat ikut mendorong pemerataan pembangunan, kelancaran distribusi, stabilitas harga barang dan jasa, serta menjaga keutuhan dan ketahanan Nasional;
5. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Ditjen Perhubungan Udara bertaraf internasional dan terbentuknya kelembagaan yang optimal dan efektif sehingga dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal dan berdaya saing;
6. Peningkatan keselamatan operasi dengan mengacu kepada aturan Internasional (ICAO) serta Pelaksanaan dan Implementasi dari Undang - Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan penetapan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

C. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pembangunan perhubungan udara diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas

jasa perhubungan udara kepada masyarakat, baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan sub sektor transportasi udara dalam jangka menengah (2010-2014) yang diimplementasikan pada pembangunan tiap tahunnya. Strategi Pembangunan perhubungan udara pada tahun 2012 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Strategi Pembangunan Perhubungan udara dalam Renstra (2010-2014) yaitu:

- a. Pembangunan perhubungan udara dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (*cost recovery*), baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
- b. Pembangunan perhubungan udara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hasil pembangunan perhubungan udara memiliki daya guna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Pembangunan perhubungan udara difokuskan pada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah.
- d. Pembangunan perhubungan udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*).
- e. Pembangunan perhubungan udara dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui dua pendekatan sekaligus yaitu mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (*market failure*).
- f. Pembangunan perhubungan udara dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistis dan nasional.
- g. Pembangunan perhubungan udara dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan, baik skala kecil, menengah maupun skala besar.

D. PROGRAM PEMBANGUNAN

Pembangunan Transportasi Udara pada tahun 2012 bertujuan melanjutkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara melalui penerapan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal, peningkatan dukungan terhadap daya saing sektor riil serta peningkatan investasi proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh swasta melalui berbagai skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dengan prioritas

menunjang pertumbuhan, pengentasan kemiskinan, dan membuka lapangan kerja yang dijabarkan dalam 4 program yaitu:

1. Program Pembangunan Transportasi Udara, bertujuan untuk mewujudkan pengembangan / pembangunan prasarana bandara sesuai pola jaringan prasarana dan pelayanan transportasi udara nasional melalui, menjamin implementasi tatanan kebandarudaraan nasional yang berdasarkan hirarki fungsi secara efisien dan efektif dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa transportasi udara serta menunjang wawasan nusantara dan ketahanan nasional dan menciptakan daya saing industri angkutan udara nasional dengan penerapan kebijakan liberalisasi angkutan udara secara selektif dalam menghadapi pasar global;
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara, bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara nasional melalui pemenuhan prosedur kerja, standar pelayanan, dan *On Time Performance* serta Implementasi ketentuan keselamatan penerbangan secara optimal;
3. Program Restrukturisasi dan Kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan reformasi kelembagaan, peraturan perundang-undangan, SDM dan pelayanan transportasi udara, menjamin prioritas kegiatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi serta mewujudkan penyempurnaan peraturan dibidang penerbangan dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional.
4. Program Penyelenggaraan Pimpinan Pemerintahan dan Kenegaraan, bertujuan untuk menjamin peningkatan kemampuan personal dibidang teknis dan operasi harus memiliki sertifikat kecakapan personal (SKP) serta tenaga manajer dan administrasi secara bertahap harus mengikuti jenjang pendidikan keprofesionalan dibidang transportasi udara.

Uraian kegiatan ke 4 program tersebut dengan biaya dari APBN sesuai pagu indikatif tahun anggaran 2012 hasil *trilateral meeting* yang disampaikan melalui Surat Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 Nomor 009/M.PPN/03/2011 dan SE-189.1/MK.02/2011 tanggal 31 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

TABEL VI - 1
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA
TRANSPORTASI UDARA

No	Program	Lokasi	Jumlah	Rp (juta)
1	Fasilitas Landasan - Landasan Pacu - Taxiway - Apron	Tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sula-wesi, NTT, Maluku, Malu-ku Utara, Papua dan Papua Barat	1.175.616 M ²	770,163.
2	Bangunan dan Terminal - Gedung Kantor - Rumah Ops, Bangunan operasional - Terminal - Jalan, Parkir, Pagar - Ged.Khusus	Tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sula-wesi, NTT, Maluku, Malu-ku Utara, Papua dan Papua Barat	418.542 M ²	140.415
3	Fasilitas Keselamatan Penerbangan: - Faslektripen	Tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat	174 Paket	462.866

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2011

TABEL VI - 2
PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN
TRANSPORTASI UDARA

No	Program	Lokasi	Jumlah	Rp (juta)
1	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Tersebar di : Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Papua Barat	1 Paket	527.467
2	Pelayanan Publikasi atau Birokrasi	Tersebar di : Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Papua Barat	1 Paket	143.643
3	Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan	Tersebar di : Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Papua Barat	1 Paket	455.415

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2011

TABEL VI - 3
PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA

No	Program	Lokasi	Jumlah	Rp (juta)
1	Subsidi Angkutan Udara Perintis dan Angkutan BBM Penerbangan Perintis	Tersebar 14 Provinsi : NAD, Sumut,Sumbar,Kaltim,Kal teng,Sulut, Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng,NTT,Maluku,Mal ut, Papua,Papua Barat	131 rute 4,028 drum	300.000
2	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan	Tersebar di : Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.	33 paket/ 118 unit	405,563
3	Pengadaan dan pemasangan <i>Jakarta Air Traffic System</i>	DKI Jakarta	1 Paket	40.000
4	Pembangunan Bandar Udara Muara Bungo	Jambi	1 Paket	30,520
5	Pembangunan Bandar Udara Waghete Baru	Papua	<i>Box Culvert 12M'</i> , Penimbunan tanah 6.000M3	6,038
6	Pembangunan Bandar Udara Pengganti Dumatubun	Maluku	Galian tanah 100.000 m3, Urugan tanah 100.000 m3, Pelapisan <i>Runway 750m x 30m 22.500 m2, overlay runway 9.000 m2, box culvert 36 m'</i> , rumah dinas tipe 36 72 Unit.	72,584
7	Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sebagai pengganti Bandar Udara Polonia-Medan	Sumatera Utara	(6 paket), <i>Multi Years Contract</i>	403,000
8	Pembangunan Bandar Udara Seram Bagian Timur	Maluku	<i>Overlay</i> pembangunan bandara 93.125 M3, kendaraan 1 unit, biaya lelang 1 paket dan honorarium 50 OP	8,381
9	Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin-Makassar	Sulawesi Selatan	konstruksi sisi udara 1 paket	21,247
10	Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok-Sorong	Papua Barat	1 paket	57,656

No	Program	Lokasi	Jumlah	Rp (juta)
11	Pengembangan Bandar Udara Pangsuma-Putussibau	Kalimantan Barat	Fasilitas bangunan (682 m ² , 440 m ¹), pembebasan tanah (150.000 m ²), fasilitas keselamatan penerbangan (1 unit)	3,579
12	Pembangunan/peningkatan Bandara di daerah perbatasan, terpencil dan rawan bencana	Tersebar di :Sabu, Rote, Nunukan, Tanah merah, Sarmi, Dobo, Saumlaki Baru, Mopah, Lasikin, Binaka, Lasondre, Rokot, Enggano, Melongguane, Nabire, Cutnyakdien, Cut ali, Muk0 muko, Komodo, Wai Oti, Gewayamtana, Wunopito, Namlea, Namrole, Naha, Numfor	1 Paket	468,269
13	Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri	Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulsel, Batam, Sumut, Bali	4 paket	234,996

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2011

TABEL VI - 4
PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN
KEPemerintahan Yang Baik

	Program/ Kegiatan 2010	Satuan	Volume	Rp (juta)
1	Belanja Pegawai Mengikat Gaji, tunjangan/vakasi dan Lembur	166	Satker	266,982
2	Belanja Barang Mengikat	166	Satker	263,282
	a. Pengadaan ATK			
	b. Pengadaan Peralatan Penunjang			
	c. Perjalanan Dinas			
	d. Biaya Pemeliharaan			
	e. Pengadaan Pakaian Dinas			
	f. Pengadaan Makan Minum/Obat Pemeriksaan Kesehatan			
	g. Pengadaan Suku Cadang Faselistrikpen			
	h. Pengadaan Barang untuk pelaksanaan Tupoksi			
3	Belanja Barang Tidak Mengikat	166	Satker	672.148
	a. Biaya Sewa (Gedung, Kendaraan, Mesin Foto Copy dll)			
	b. Pokja Perencanaan, Pokja Keuangan dan Pokja Hukum			
	c. Penunjang Pelaksanaan Tupoksi			

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2011

Adapun untuk anggaran total Dirjen Perhubungan Udara (Pagu Indikatif 2012) berdasarkan hasil *trilateral meeting* yang diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon II dapat dilihat pada tabel VI-5 dimana kegiatan 2012 antara lain yaitu Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubud, Pelayanan Angkutan Udara Perintis (BBTM), Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan, Pengawasan & Pembinaan Kelaikan Udara & Pengoperasian Pesawat Udara.

Tabel VI-5
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
TRANSPORTASI UDARA

No.	Program / Kegiatan 2012	Jumlah	Rp (ribu)
1	Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubud	151 bandara	915,077,037
2	Pelayanan Angkutan Udara Perintis (BBTM)	22 UPT/bandara	300.000.000
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	173 bandara	2,344,378,939
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan	118 UPT/Bandara	652,654,447
5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan	84 UPT/Bandara	462,866,757
6	Pengawasan & Pembinaan Kelaikan Udara & Pengops Pesawat Udara	2 UPT/ Bandara	319,101,180
TOTAL			4,994,078,360

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara, 2011

Kegiatan Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubud secara lebih detail dapat dilihat pada tabel VI-6.

Tabel VI-6
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN & DUKUNGAN TEKNIS
LAINNYA DITJEN HUBUD

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	10,084,507
1	Cut Nyak Dhien-Naga Raya	4,219,906
2	Lasikin-Sinabang	1,293,416
3	Cut Ali-Tapak Tuan	1,591,388
4	Maimun Saleh-Sabang	2,004,045
5	Rembele-Takengon	975,752
II	SUMATERA UTARA	20,504,833
1	Adbandara Polonia-Medan	7,604,534
2	Silangit-Siborong Borong	1,474,441

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
3	DR. FL. Tobing-Tapanuli Tengah	4,516,777
4	Aek Godang-Pdg Sidempuan	1,785,235
5	Binaka - Gunung Sitoli	4,117,125
6	Lasondre-PP. Batu	1,006,721
III	SUMATERA BARAT	1,119,024
1	Sipora-Rokot	1,119,024
IV	BENGKULU	12,092,347
1	Fatmawati Soekarno	11,373,241
2	Muko-Muko - Muko Muko	719,106
V	KEPULAUAN RIAU	17,043,509
1	Dabo-Singkep	3,590,284
2	Seibati-Tanjung Balai Karimun	1,971,402
3	Hang Nadim-Batu Besar Pulau	11,481,823
VI	R I A U	3,793,889
1	Japura - Rengat	3,793,889
VII	L A M P U N G	14,069,139
1	Radin Inten II-Lampung	13,490,555
2	Pekoserai-Lampung Barat	578,584
VIII	J A M B I	1,287,336
1	Depati Parbo-Kerinci	1,287,336
IX	BANGKA BELITUNG	9,165,656
1	H. AS. Hanandjoedin-Tjg Pandan	9,165,656
X	JAWA BARAT	2,944,151
1	Cakrabuwana-Cirebon	2,944,151
XI	B A N T E N	13,067,979
1	Budiarto-Curug	13,067,979
XII	JAWA TENGAH	6,030,473
1	Dewadaru-Karimun Jawa	1,926,612
2	Tunggul Wulung-Cilacap	4,103,861
XIII	JAWA TIMUR	12,399,683
1	Adbandara Juanda-Surabaya	10,253,225
2	Banyuwangi	1,044,694
3	Trunojoyo-Sumenep	1,101,764
XIV	B A L I	8,047,675
1	Adbandara Ngurah Rai	8,047,675
XV	KALIMANTAN TIMUR	37,287,383
1	Temindung-Samarinda	5,944,995
2	Melak	897,366
3	Long Ampung	692,096
4	Datah Dawai	755,371
5	Juwata-Tarakan	17,679,021

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
6	Kalimarau	4,612,790
7	Tanjung Harapan	2,069,729
8	Yuvei Semaring-Long Bawan	1,346,575
9	Nunukan	2,423,786
10	Malinau	865,654
XVI	KALIMANTAN TENGAH	29,000,955
1	Tjilik Riwut-Palangkaraya	11,301,104
2	Tumbang Samba	950,173
3	H. Asan - Sampit	5,643,820
4	Iskandar-Pangkalan Bun	6,075,865
5	Kuala Kurun	1,186,092
6	Beringin - Muara Teweh	1,466,839
7	Sunggu-Buntok	1,199,435
8	Kuala Pembuang	1,177,627
XVII	KALIMANTAN BARAT	8,627,945
1	Susilo-Sintang	1,582,542
2	Nangapinoh	1,422,108
3	Pangsuma-Putussibau	1,654,422
4	Rahadi Oesman-Ketapang	3,968,873
XVIII	KALIMANTAN SELATAN	3,353,709
1	Gusti Sjamsir Alam-Kotabaru	3,353,709
XIX	SULAWESI UTARA	3,506,860
1	Naha-Tahuna	1,777,265
2	Melongguane	1,729,595
XX	GORONTALO	9,674,157
1	Djalaluddin-Gorontalo	9,674,157
XXI	SULAWESI TENGAH	21,761,267
1	Mutiara-Palu	14,018,971
2	Syukuran Aminuddin Amir-Luwuk	2,817,419
3	Lalos-Toli Toli	1,999,029
4	Pogogul - Buol	899,128
5	Kasiguncu-Poso	2,026,720
XXII	SULAWESI TENGGARA	16,532,651
1	Halu Oleo-Kendari	12,957,898
2	Betoambari-Bau Bau	2,104,034
3	Sugimanuru-Muna	1,470,719
XXIII	SULAWESI SELATAN	14,209,263
1	Adbandara Hasanuddin	7,816,907
2	Pongtiku-Tana Toraja	2,703,533
3	Andi Jemma-Masamba	2,668,816
4	Aroeppala-Selayar	1,020,007
XXIV	SULAWESI BARAT	2,397,762
1	Tampa Padang-Mamuju	2,397,762

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
XXV	NUSA TENGGARA TIMUR	32,098,414
1	Mali-Alor	1,826,115
2	Gewayantana-Larantuka	1,344,301
3	Soa - Bajawa	1,744,953
4	Wunopito-Lewoleba	1,322,245
5	Lekunik-Rote	1,313,576
6	Haliwen-Atambua	1,486,928
7	Tardamu-Sabu	1,269,366
8	Satartacik-Ruteng	2,581,500
9	H.H. Aroeboesman-Ende	3,274,827
10	Komodo-Labuhan Bajo	3,269,550
11	Waioti - Maumere	4,939,851
12	Umbu Mehang Kunda-Waingapu	4,879,884
13	Tambolaka-Waikabubak	2,845,318
XXVI	NUSA TENGGARA BARAT	10,949,369
1	Brangbiji-Sumbawa Besar	3,878,799
2	M. Salahuddin-Bima	7,070,570
XXVII	M A L U K U	8,062,073
1	Bandaneira	2,105,244
2	Dumatubun-Langgur	3,891,098
3	Saumlaki-Baru	1,229,892
4	D o b o	835,839
XXVIII	MALUKU UTARA	13,840,140
1	Babullah-Ternate	7,951,638
2	Buli-Maba	586,979
3	Usman Sadik-Labuha	1,499,050
4	Gamarmalamo-Galela	1,695,574
XXIX	P A P U A	96,767,323
1	Sentani-Jayapura	30,558,488
2	Mopah-Merauke	11,270,320
3	Kamur	768,685
4	Bomakia	762,357
5	N a b i r e	7,014,130
6	Moanamani	2,051,329
7	Enarotali	1,804,264
8	Wamena	7,722,079
9	Mararena-Sarmi	1,812,164
10	S. Tjondronegoro-Serui	2,917,280
11	Kokonao-Timika	1,176,744
12	O b a n o	1,160,181
13	I l l u	848,809
14	I l a g a	1,161,099
15	Tanah Merah-Merauke	1,714,050
16	Mindiptanah-Merauke	1,543,570
17	O k s i b i l	2,947,528
18	Waghete	1,666,734
19	M u l i a	2,015,130

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
20	Bokondini	1,150,093
21	K e p i	955,089
22	O k a b a	1,327,251
23	N u m f o r	938,192
24	Karubaga	1,523,115
25	E w e r	984,310
26	B a t o m	935,087
27	B a d e	1,378,451
28	Senggeh	649,978
29	T i o m	1,026,583
30	T i m i k a	1,176,724
31	Dabra	743,951
32	Lereh	762,408
33	Waris	761,129
34	Kimam	791,990
35	Senggo	748,031
XXX	PAPUA BARAT	33,661,206
1	Rendani-Manokwari	6,253,208
2	M e r d e y	1,208,452
3	K e b a r	1,434,947
4	W a s i o r	1,317,609
5	B i n t u n i	1,152,190
6	Torea-Fak Fak	2,864,172
7	Kaimana	2,199,600
8	Domine Eduar Osok-Sorong	11,709,332
9	Teminabuan	1,022,825
10	Inanwatan	1,020,746
11	Kambuaya	1,255,834
12	Ayawasi	1,226,854
13	B a b o	995,437
XXXI	DKI JAKARTA	446,019,322
1	Kantor Pusat Setditjen Hubud	124,312,359
2	Direktorat Bandar Udara	51,947,435
3	Direktorat Angkutan Udara	23,892,567
4	Direktorat Keamanan Penerbangan	28,600,692
5	Direktorat Navigasi Penerbangan	97,008,506
6	Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	40,781,353
7	Balai Kesehatan Penerbangan	11,842,420
8	Balai Kalibrasi Faspen	41,807,035
9	Balai Elektronika	10,011,026
10	Adbandara Soekarno-Hatta	15,815,929
	TOTAL	915.077.037

Anggaran untuk kegiatan pelayanan angkutan udara perintis yang dapat membuka keterisolasian wilayah dapat dilihat pada tabel VI.7

Tabel VI-7
Kegiatan Pelayanan Angkutan Udara Perintis

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	33,225,325
1	Cut Nyak Dhien-Naga Raya	21,248,694
2	Rembele-Takengon	11,976,631
II	SUMATERA UTARA	17,848,016
1	Binaka - Gunung Sitoli	17,848,016
III	KALIMANTAN TIMUR	19,019,458
1	Temindung-Samarinda	19,019,458
IV	KALIMANTAN TENGAH	8,992,755
1	Beringin - Muara Teweh	8,992,755
V	KALIMANTAN BARAT	11,335,500
1	Rahadi Oesman-Ketapang	11,335,500
VI	SULAWESI TENGAH	15,548,417
1	Lalos-Toli Toli	15,548,417
2	Kasiguncu-Poso	
VII	SULAWESI SELATAN	31,682,126
1	Andi Jemma-Masamba	18,530,854
2	Seko	0
3	Rampi	0
4	Aroepala-Selayar	13,151,272
VIII	SULAWESI BARAT	7,791,708
1	Tampa Padang-Mamuju	7,791,708
IX	NUSA TENGGARA TIMUR	8,118,129
1	Tardamu-Sabu	8,118,129
X	M A L U K U	23,728,767
1	Dumatubun-Langgur	23,728,767
XI	MALUKU UTARA	19,074,599
1	Babullah-Ternate	19,074,599
XII	P A P U A	83,092,863
1	Sentani-Jayapura	14,442,120
2	Mopah-Merauke	16,616,463
3	N a b i r e	16,954,995
4	Wamena	11,627,787
5	T i m i k a	23,451,498
XIII	PAPUA BARAT	17,421,747
1	RENDANI-MANOKWARI	17,421,747
XIV	DKI JAKARTA	3,120,590

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
1	Dit. Angkutan Udara	3,120,590
	Total	300,000,000

Adapun Anggaran untuk Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Tahun Anggaran 2012 (Pagu Indikatif 2012) dapat dilihat pada Tabel VI-8.

Tabel VI-8
Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana BU

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	9,900,832
1	Cut Nyak Dhien-Naga Raya	6,354,700
2	Lasikin-Sinabang	
3	Cut Ali-Tapaktuan	449,898
4	Maimun Saleh-Sabang	1,976,634
5	Rembele-Takengon	1,119,600
II	SUMATERA UTARA	325,932,259
1	Adbandara Polonia-Medan	2,663,079
2	Bandara Medan Baru	281,514,035
3	Silangit-Siborong Borong	15,637,500
4	Dr. FL. Tobing-Tapanuli Tengah	9,574,795
5	Aek Godang-Pdg Sidempuan	2,376,130
6	Binaka - Gunung Sitoli	11,367,000
7	Lasondre-PP. Batu	2,799,720
III	SUMATERA SELATAN	19,061,186
1	Silampari	12,630,325
2	Pagar Alam	6,430,861
IV	SUMATERA BARAT	29,983,558
1	Sipora-Rokot	29,983,558
V	BENGGKULU	30,328,000
1	Fatmawati Soekarno	28,623,000
2	Muko-Muko di Muko Muko	1,705,000
VI	KEPULAUAN RIAU	17,293,395
1	Dabo-Singkep	6,233,750
2	Seibati-Tanjung Balai Karimun	1,379,722
3	R.H. Fisabilillah-Tanjung Pinang	6,589,966
4	Hang Nadim-Batu Besar Pulau	3,089,957
VII	R I A U	60,336,848
1	Japura - Rengat	50,770,688
2	Pasir Pangarayan-Rokan Hulu	9,566,160
VIII	L A M P U N G	37,348,230

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
1	Radin Inten II-Lampung	32,829,594
2	Pekoserai-Lampung Barat	4,518,636
IX	J A M B I	39,691,446
1	Depati Parbo-Kerinci	9,241,236
2	Muara Bungo	30,450,210
X	BANGKA BELITUNG	22,460,235
1	H. AS. Hanandjoedin-Tjg Pandan	20,141,500
2	Depati Amir-Pangkal Pinang	2,318,735
XI	JAWA BARAT	967,945
1	Cakrabuwana-Cirebon	967,945
XII	B A N T E N	4,474,000
1	Budiarto-Curug	4,474,000
XIII	JAWA TENGAH	16,134,389
1	Dewadaru-Karimunjawa	1,520,170
2	A. Yani-Semarang	10,211,298
3	Tunggul Wulung-Cilacap	4,402,922
XIV	JAWA TIMUR	45,697,731
1	Adbandara Juanda-Surabaya	9,048,000
2	Juanda-Surabaya	5,195,309
3	Banyuwangi	4,255,159
4	Abdul Rachman Saleh-Malang	16,332,437
5	Bawean	6,996,384
6	Trunojoyo-Sumenep	3,870,442
XV	B A L I	2,241,100
1	Adbandara Ngurah Rai	2,241,100
XVI	D.I. YOGYAKARTA	46,542,002
1	Adi Sucipto-Yogyakarta	46,542,002
XVII	KALIMANTAN TIMUR	191,634,832
1	Temindung-Samarinda	5,177,773
2	Melak	5,291,000
3	Long Ampung	12,333,700
4	Datah Dawai	3,359,546
5	Juwata-Tarakan	108,132,550
6	Kalimarau	32,265,650
7	Tanjung Harapan	873,813
8	Yuvei Semaring-Long Bawan	12,586,800
9	Nunukan	6,386,000
10	Malinau	5,228,000
XVIII	KALIMANTAN TENGAH	72,434,853
1	Tjilik Riwut-Palangkaraya	16,265,846
2	Tumbang Samba	1,066,000
3	H. Asan - Sampit	12,017,900
4	Iskandar-Pangkalan Bun	27,823,105

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
5	Kuala Kurun	1,740,220
6	Beringin - Muara Teweh	10,719,125
7	Sunggu-Buntok	1,249,636
8	Kuala Pembuang	1,553,021
XIX	KALIMANTAN BARAT	16,815,800
1	Susilo-Sintang	2,466,000
2	Nangapinoh	871,600
3	Pangsuma-Putussibau	1,528,200
4	Rahadi Oesman-Ketapang	11,950,000
XX	KALIMANTAN SELATAN	7,943,000
1	Gusti Sjamsir Alam-Kotabaru	7,943,000
XXI	SULAWESI UTARA	44,834,135
1	Naha-Tahuna	3,828,972
2	Sam Ratulangi-Manado	23,571,830
3	Melongguane	17,433,333
XXII	GORONTALO	34,261,200
1	Djalaluddin-Gorontalo	34,261,200
XXIII	SULAWESI TENGAH	64,179,442
1	Mutiara-Palu	30,893,942
2	Syukuran Aminuddin Amir-Luwuk	15,448,800
3	Lalos-Toli Toli	6,610,800
4	Pogogul - Buol	1,270,900
5	Kasiguncu-Poso	9,955,000
XXIV	SULAWESI TENGGARA	72,381,500
1	Halu Oleo-Kendari	62,311,000
2	Betoambari-Bau Bau	5,203,500
3	Sugimanuru-Muna	4,867,000
XXV	SULAWESI SELATAN	47,149,909
1	Adbandara Hasanuddin	12,686,206
2	Pongtiku-Tana Toraja	4,011,250
3	Andi Jemma-Masamba	18,901,400
4	Seko	950,000
5	Rampi	2,300,000
6	Aroepala-Selayar	8,301,053
XXVI	SULAWESI BARAT	126,006,500
1	Tampa Padang-Mamuju	126,006,500
XXVII	NUSA TENGGARA TIMUR	95,162,712
1	Mali-Alor	4,570,000
2	Gewayantana-Larantuka	4,108,775
3	Soa - Bajawa	2,620,200
4	Wunopito-Lewoleba	3,458,825
5	Lekunik-Rote	5,358,250
6	Haliwen-Atambua	5,302,000

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
7	Tardamu-Sabu	2,432,000
8	Satartacik-Ruteng	4,020,000
9	H.H. Aroeboesman-Ende	13,025,600
10	Komodo-Labuhan Bajo	11,605,000
11	Waioti - Maumere	12,711,470
12	Umbu Mehang Kunda-Waingapu	5,450,592
13	Tambolaka-Waikabubak	20,500,000
XXVIII	NUSA TENGGARA BARAT	17,810,808
1	Brangbiji-Sumbawa Besar	9,321,122
2	M. Salahuddin-Bima	8,489,686
XXIX	M A L U K U	101,842,088
1	Bandaneira	18,449,950
2	Namniwel-P. Buru	5,272,480
3	Dumatubun-Langgur	44,964,508
4	Saumlaki-Baru	25,848,900
5	D o b o	7,306,250
XXX	MALUKU UTARA	49,619,088
1	Babullah-Ternate	33,717,388
2	Buli-Maba	3,147,000
3	Kuabang-Kao	5,874,250
4	Usman Sadik-Labuha	3,341,450
5	Gamarmalamo-Galela	3,539,000
XXXI	P A P U A	298,948,837
1	Sentani-Jayapura	73,119,088
2	Mopah-Merauke	17,557,450
3	Kamur	7,096,800
4	Bomakia	5,797,242
5	N a b i r e	11,050,160
6	Moanamani	2,016,000
7	Enarotali	3,067,400
8	Wamena	38,223,545
9	Mararena-Sarmi	442,375
10	S. Tjondronegoro-Serui	11,072,000
11	Kokonao-Timika	4,894,000
12	O b a n o	574,147
13	I l l u	3,105,611
14	I l a g a	10,646,000
15	Tanah Merah-Maerauke	10,394,129
16	Mindiptanah-Merauke	8,022,225
17	O k s i b i l	15,400,502
18	Waghete	4,371,575
19	M u l i a	6,701,441
20	Bokondini	657,000
21	K e p i	2,692,500
22	O k a b a	5,080,000
23	N u m f o r	2,003,000
24	Karubaga	1,792,500
25	E w e r	1,380,900

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
26	B a t o m	5,284,480
27	B a d e	3,057,700
28	Senggeh	2,017,500
29	T i o m	4,699,988
30	T i m i k a	21,723,140
31	Dabra	5,445,750
32	Lereh	1,655,500
33	Waris	1,000,000
34	Kimam	1,633,500
35	Senggo	5,273,690
XXXII	PAPUA BARAT	143,310,142
1	Rendani-Manokwari	48,037,720
2	M e r d e y	30,000
3	K e b a r	7,476,137
4	W a s i o r	1,532,500
5	B i n t u n i	3,481,000
6	Torea-Fak Fak	8,331,270
7	Kaimana	8,158,875
8	Domine Eduar Osok-Sorong	44,037,230
9	Teminabuan	3,925,580
10	Inanwatan	2,008,382
11	Kambuaya	11,201,072
12	Ayawasi	3,764,376
13	B a b o	1,326,000
XXXIII	DKI JAKARTA	257,937,829
1	Kantor Pusat Setditjen Hubud	32,462,077
2	Dit. Bandar Udara	186,079,500
3	Balai Kesehatan Penerbangan	10,527,190
4	Balai Kalibrasi Faspen	898,000
5	Balai Elektronika	5,101,000
6	Abandara Soekarno-Hatta	17,870,062
7	Otoritas Bandara Wilayah I	500,000
8	Otoritas Bandara Wilayah II	500,000
9	Otoritas Bandara Wilayah III	500,000
10	Otoritas Bandara Wilayah IV	500,000
11	Otoritas Bandara Wilayah V	500,000
12	Otoritas Bandara Wilayah VI	500,000
13	Otoritas Bandara Wilayah VII	500,000
14	Otoritas Bandara Wilayah VIII	500,000
15	Otoritas Bandara Wilayah IX	500,000
16	Otoritas Bandara Wilayah X	500,000
TOTAL		2.344.378.939

Anggaran untuk Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan dalam Pagu Indikatif 2012 dapat dilihat pada tabel VI-9.

Tabel VI-9
Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Kampen

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	750,000
1	Maimun Saleh-Sabang	400,000
2	Rembele-Takengon	350,000
II	SUMATERA UTARA	3,997,000
1	Adbandara Polonia-Medan	415,000
2	Silangit-Siborong Borong	1,050,000
3	Dr. FL. Tobing-Tapanuli Tengah	950,000
4	Aek Godang-Pdg Sidempuan	800,000
5	Binaka - Gunung Sitoli	782,000
III	SUMATERA SELATAN	350,000
1	Silampari	350,000
2	Pagar Alam	0
IV	SUMATERA BARAT	914,600
1	Sipora-Rokot	914,600
V	BENGKULU	1,375,000
1	Fatmawati Soekarno	1,000,000
2	Muko-Muko di Muko Muko	375,000
VI	KEPULAUAN RIAU	21,624,850
1	Dabo-Singkep	700,000
2	Hang Nadim-Batu Besar Pulau	20,924,850
VII	R I A U	10,084,000
1	Japura - Rengat	9,679,000
2	Pasir Pangarayan-Rokan Hulu	405,000
VIII	L A M P U N G	1,352,500
1	Radin Inten II-Lampung	1,352,500
IX	J A M B I	110,000
1	Depati Parbo-Kerinci	110,000
X	BANGKA BELITUNG	1,142,000
1	H. AS. Hanandjoedin-Tjg Pandan	1,142,000
XI	JAWA BARAT	136,000
1	Cakrabuwana-Cirebon	136,000
XII	B A N T E N	630,000
1	Budiarto-Curug	630,000

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
XIII	JAWA TENGAH	350,000
1	Tunggul Wulung-Cilacap	350,000
XIV	JAWA TIMUR	3,810,900
1	Adbandara Juanda-Surabaya	2,933,900
2	Banyuwangi	460,000
3	Bawean	6,000
4	Trunojoyo-Sumenep	411,000
XV	B A L I	51,700
1	Adbandara Ngurah Rai	51,700
XVI	D.I. YOGYAKARTA	350,000
1	Adi Sucipto-Yogyakarta	350,000
XVII	KALIMANTAN TIMUR	31,124,000
1	Temindung-Samarinda	5,500,000
2	Melak	960,000
3	Long Ampung	750,000
4	Datah Dawai	854,000
5	Juwata-Tarakan	19,650,000
6	Kalimarau	700,000
7	Tanjung Harapan	350,000
8	Nunukan	1,160,000
9	Malinau	1,200,000
XVIII	KALIMANTAN TENGAH	4,680,000
1	Tjilik Riwut-Palangkaraya	1,975,000
2	Tumbang Samba	764,000
3	H. Asan - Sampit	502,000
4	Iskandar-Pangkalan Bun	175,000
5	Kuala Kurun	914,000
6	Sunggu-Buntok	350,000
XIX	KALIMANTAN BARAT	941,800
1	Pangsuma-Putussibau	396,800
2	Rahadi Oesman-Ketapang	545,000
XX	KALIMANTAN SELATAN	750,000
1	Gusti Sjamsir Alam-Kotabaru	750,000
XXI	SULAWESI UTARA	4,670,000
1	Naha-Tahuna	4,670,000

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
XXII	GORONTALO	750,000
1	Djalaluddin-Gorontalo	750,000
XXIII	SULAWESI TENGAH	6,735,000
1	Mutiara-Palu	450,000
2	Syukuran Aminuddin Amir-Luwuk	5,535,000
3	Kasiguncu-Poso	750,000
XXIV	SULAWESI TENGGARA	2,690,000
1	Halu Oleo-Kendari	1,100,000
2	Betoambari-Bau Bau	600,000
3	Sugimanuru-Muna	990,000
XXV	SULAWESI SELATAN	10,661,000
1	Adbandara Hasanuddin	744,000
2	Pongtiku-Tana Toraja	350,000
3	Andi Jemma-Masamba	3,875,000
4	Seko	832,000
5	Aroeppala-Selayar	4,860,000
XXVI	SULAWESI BARAT	6,317,500
1	Tampa Padang-Mamuju	6,317,500
XXVII	NUSA TENGGARA TIMUR	16,070,000
1	Mali-Alor	874,000
2	Gewayantana-Larantuka	250,000
3	Soa - Bajawa	25,000
4	Wunopito-Lewoleba	4,020,000
5	Lekunik-Rote	350,000
6	Haliwen-Atambua	350,000
7	Tardamu-Sabu	600,000
8	Satartacik-Ruteng	877,000
9	H.H. Aroeboesman-Ende	4,386,000
10	Komodo-Labuhan Bajo	750,000
11	Waioti - Maumere	1,696,000
12	Umbu Mehang Kunda-Waingapu	1,500,000
13	Tambolaka-Waikabubak	392,000
XXVIII	NUSA TENGGARA BARAT	220,000
1	Brangbiji-Sumbawa Besar	220,000
XXIX	M A L U K U	5,158,000
1	Bandaneira	4,000,000
2	Saumlaki-Baru	750,000
3	D o b o	408,000

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI Rp (ribu)
XXX	MALUKU UTARA	4,756,000
1	Babullah-Ternate	2,400,000
2	Buli-Maba	750,000
3	Kuabang-Kao	828,000
4	Gamarmalamo-Galela	778,000
XXXI	P A P U A	19,547,500
1	Sentani-Jayapura	1,402,500
2	Mopah-Merauke	1,310,000
3	Moanamani	400,000
4	Enarotali	400,000
5	Wamena	1,435,000
6	Mararena-Sarmi	400,000
7	S. Tjondronegoro-Serui	870,000
8	Kokonao-Timika	1,150,000
9	Tanah Merah-Maerauke	4,000,000
10	Mindiptanah-Merauke	660,000
11	O k s i b i l	560,000
12	M u l i a	303,000
13	Bokondini	2,750,000
14	K e p i	800,000
15	O k a b a	850,000
16	B a d e	800,000
17	Senggeh	22,000
18	T i o m	910,000
19	Dabra	106,000
20	Waris	419,000
XXXII	PAPUA BARAT	5,620,300
1	K e b a r	400,000
2	W a s i o r	842,000
3	Torea-Fak Fak	750,000
4	Kaimana	750,000
5	Domine Eduar Osok-Sorong	823,500
6	Inanwatan	800,000
7	Ayawasi	840,000
8	B a b o	414,800
XXXIII	DKI JAKARTA	237,843,650
1	Dit. Keamanan penerbangan	220,069,877
2	Balai Elektronika	1,000,000
	TOTAL	652.654.447

Adapun alokasi anggaran Tahun 2012 untuk kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan per Provinsi dapat dilihat pada tabel VI-10.

Tabel VI-10
Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navpen

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI (Rp/Ribu)
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2,824,000
1	Lasikin-Sinabang	2,824,000
II	SUMATERA UTARA	128,845,966
1	Bandara Medan Baru	121,485,966
2	Silangit-Siborong Borong	7,150,000
3	Dr. FL. Tobing-Tapanuli Tengah	150,000
4	Aek Godang-Pdg Sidempuan	60,000
III	SUMATERA SELATAN	25,000
1	Silampari	25,000
IV	BENGGKULU	4,324,000
1	Fatmawati Soekarno	3,450,000
2	Muko-Muko di Muko Muko	874,000
V	KEPULAUAN RIAU	2,644,000
1	Dabo-Singkep	1,128,000
2	R.H. Fisabilillah-Tanjung Pinang	1,516,000
VI	R I A U	4,068,500
1	Japura - Rengat	3,860,500
2	Pasir Pangarayan-Rokan Hulu	208,000
VIII	L A M P U N G	15,347,000
1	Radin Inten II-Lampung	15,213,000
2	Pekoserai-Lampung Barat	134,000
IX	J A M B I	70,000
1	Muara Bungo	70,000
X	BANGKA BELITUNG	17,585,820
1	H. AS. Hanandjoedin-Tjg Pandan	232,000
2	Depati Amir-Pangkal Pinang	17,353,820
XI	JAWA BARAT	300,000
1	Cakrabuwana-Cirebon	300,000
XII	B A N T E N	11,480,000
1	Budiarto-Curug	11,480,000
XIII	JAWA TENGAH	5,590,250
1	Dewadaru-Karimunjawa	4,574,000
2	Tunggul Wulung-Cilacap	1,016,250
XIV	JAWA TIMUR	682,000

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI (Rp/Ribu)
1	Banyuwangi	200,000
2	Bawean	90,000
3	Trunojoyo-Sumenep	392,000
XVII	KALIMANTAN TIMUR	29,151,500
1	Temindung-Samarinda	2,400,000
2	Long Ampung	2,804,000
3	Juwata-Tarakan	22,982,000
4	Kalimarau	568,000
5	Tanjung Harapan	147,500
6	Yuvei Semaring-Long Bawan	250,000
XVIII	KALIMANTAN TENGAH	19,326,200
1	Tjilik Riwut-Palangkaraya	9,784,200
2	H. Asan - Sampit	400,000
3	Iskandar-Pangkalan Bun	9,132,000
4	Kuala Pembuang	10,000
XX	KALIMANTAN SELATAN	904,000
1	Gusti Sjamsir Alam-Kotabaru	904,000
XXI	SULAWESI UTARA	5,074,000
1	Melongguane	5,074,000
XXII	GORONTALO	12,797,800
1	Djalaluddin-Gorontalo	12,797,800
XXIII	SULAWESI TENGAH	4,229,000
1	Mutiara-Palu	3,299,000
2	Syukuran Aminuddin Amir-Luwuk	800,000
3	Pogogul - Buol	130,000
XXIV	SULAWESI TENGGARA	10,681,000
1	Halu Oleo-Kendari	4,817,000
2	Betoambari-Bau Bau	5,864,000
XXV	SULAWESI SELATAN	1,010,000
1	Andi Jemma-Masamba	858,000
2	Seko	60,000
3	Rampi	92,000
XXVI	SULAWESI BARAT	210,000
1	Tampa Padang-Mamuju	210,000
XXVII	NUSA TENGGARA TIMUR	14,770,000
1	Soa - Bajawa	5,800,000
2	Wunopito-Lewoleba	70,000
3	Lekunik-Rote	70,000
4	Haliwen-Atambua	2,818,000

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI (Rp/Ribu)
5	Tardamu-Sabu	138,000
6	Komodo-Labuhan Bajo	5,874,000
XXVIII	NUSA TENGGARA BARAT	686,000
1	Brangbiji-Sumbawa Besar	386,000
2	M. Salahuddin-Bima	300,000
XXIX	M A L U K U	2,750,000
1	Bandaneira	2,750,000
XXX	MALUKU UTARA	8,428,000
1	Babullah-Ternate	5,016,000
2	Buli-Maba	404,000
3	Kuabang-Kao	60,000
4	Usman Sadik-Labuha	2,750,000
5	Gamarmalamo-Galela	198,000
XXXI	P A P U A	105,625,000
1	Sentani-Jayapura	16,780,000
2	Mopah-Merauke	33,250,000
3	N a b i r e	3,228,000
4	Moanamani	290,000
5	Enarotali	2,792,000
6	Wamena	3,493,000
7	Kokonao-Timika	190,000
8	Tanah Merah-Merauke	800,000
9	Mindiptanah-Merauke	2,842,000
10	O k s i b i l	2,750,000
11	N u m f o r	70,000
12	Karubaga	2,750,000
13	E w e r	130,000
14	B a t o m	130,000
15	T i o m	70,000
16	T i m i k a	35,920,000
17	Lereh	70,000
18	Kimam	70,000
XXXII	PAPUA BARAT	9,624,817
1	Rendani-Manokwari	3,830,217
2	M e r d e y	94,800
3	K e b a r	60,000
4	Torea-Fak Fak	3,620,000
5	Kaimana	878,800
6	Domine Eduar Osok-Sorong	1,086,000

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI (Rp/Ribu)
7	Inanwatan	55,000
XXXIII	DKI JAKARTA	134,705,718
1	Dit. Navigasi penerbangan	92,456,327
2	Balai Elektronika	42,249,391
	TOTAL	462.866.757

Anggaran untuk Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara pada Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada Tabel VI-11.

Tabel VI-11
Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana KUPPU

NO	UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	ALOKASI (Rp/Ribu)
I	DKI JAKARTA	356,688,900
1	Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat	25,477,674
2	Balai Kalibrasi Faspen	331,211,226
	TOTAL	319.101.180